
MENGELOLA TRADISI, MERAWAT IDENTITAS; Praktik Manajemen Budaya Zapin Melayu di Riau

Erni^{1*}, Artis²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia;

* erni@uin-suska.ac.id of the corresponding author

Abstract

This article discusses cultural management practices in the preservation of Malay Zapin Dance in Riau Province. Zapin dance is a cultural expression that is full of meaning and serves as a reinforcement of the identity of the Malay community. However, in the midst of rapid globalization, the existence of Zapin faces serious challenges, especially in terms of regeneration of performers and adaptation to the current context. Using a descriptive qualitative approach and a case study, this article analyzes cultural management practices through four main functions: planning, organizing, mobilizing, and monitoring. The results show that although there have been various preservation efforts, the approach is still ceremonial and not fully adaptive. This article recommends the importance of transforming the approach to cultural preservation from a short-term project to a sustainable, participatory, and local values-based managerial strategy.

Keywords

Cultural Management, Zapin Dance, Malay Culture, Preservation, Local Identity

Abstrak

Artikel ini membahas praktik manajemen budaya dalam pelestarian Tari Zapin Melayu di Provinsi Riau. Tari Zapin merupakan ekspresi budaya yang sarat makna dan berfungsi sebagai penguat identitas masyarakat Melayu. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, keberadaan Zapin menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal regenerasi pelaku dan adaptasi terhadap konteks kekinian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, artikel ini menganalisis praktik manajemen budaya melalui empat fungsi utama: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya pelestarian, namun pendekatannya masih bersifat seremonial dan belum sepenuhnya adaptif. Artikel ini merekomendasikan pentingnya transformasi pendekatan pelestarian budaya dari yang bersifat proyek jangka pendek menjadi strategi manajerial yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai lokal.

Kata Kunci

Manajemen Budaya, Tari Zapin, Budaya Melayu, Pelestarian, Identitas Lokal

PENDAHULUAN

Budaya Melayu di Riau merupakan warisan tak ternilai yang tidak hanya mencerminkan identitas etnik semata, tetapi juga menyimpan jejak historis, nilai-nilai kehidupan, serta kearifan lokal yang telah mengakar dan membentuk tatanan sosial masyarakatnya. (Hasanuddin, 2017) Dalam konteks ini, budaya Melayu tidak dapat dipahami sekadar sebagai manifestasi simbolik berupa bahasa, adat istiadat, atau seni tradisional, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus hidup dan bertransformasi dalam menjawab dinamika zaman.

Namun, ketika budaya Melayu dijadikan sebagai fondasi identitas kolektif, muncul perdebatan konseptual mengenai siapa yang berhak menyandang label "Melayu" dan sejauh mana unsur budaya ini bersifat inklusif terhadap keragaman internal masyarakat Riau (Muhammad Hanif & Dian Dwi OkPutra, 2021). Di satu sisi, ada pandangan esensialis yang menekankan bahwa menjadi Melayu berarti terikat pada Islam sebagai agama mayoritas dan

bagian integral dari sistem nilai Melayu itu sendiri. Pandangan ini sering kali menegaskan adagium “Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu” sebagai prinsip mutlak yang sulit diganggu gugat (Abdillah, 2023).

Di sisi lain, pendekatan yang lebih konstruktif mengajukan argumen bahwa budaya Melayu seharusnya dilihat sebagai ruang kultural yang terbuka, dialogis, dan lentur terhadap perubahan. Dalam kerangka ini, identitas Melayu tidak bersifat monolitik, melainkan hasil negosiasi berbagai elemen historis dan sosiokultural, termasuk pengaruh dari komunitas adat non-Muslim seperti Suku Akit, Talang Mamak, atau Anak Rawa yang secara historis juga menjadi bagian dari lanskap budaya Riau. (Hidayat, 2008) Pertanyaannya kemudian: apakah pengabaian terhadap komunitas-komunitas ini dalam narasi besar "kemelayuan" bukan merupakan bentuk penyingkiran simbolik yang dilegitimasi oleh politik identitas berbasis agama?

Perdebatan ini membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana warisan budaya tidak selalu netral dan bebas nilai, tetapi sering kali diproduksi dan direproduksi dalam relasi kuasa tertentu. Dalam konteks Riau, hegemonisasi tafsir tertentu atas budaya Melayu bisa berdampak pada marginalisasi budaya lain yang tidak masuk dalam kategori "resmi" atau "ideal" versi dominan (Budiman, 2018). Oleh karena itu, studi tentang budaya Melayu di Riau perlu didorong ke arah yang lebih interogatif dan reflektif, tidak hanya merayakan warisan kultural, tetapi juga mengkaji bagaimana budaya itu dikonstruksi, digunakan, dan bahkan dipolitisasi dalam konteks sosial-kultural yang lebih luas.

Budaya Melayu di Riau merupakan warisan tak ternilai yang tidak hanya mencerminkan identitas etnik semata, tetapi juga menyimpan jejak historis, nilai-nilai kehidupan, serta kearifan lokal yang telah mengakar dan membentuk tatanan sosial masyarakatnya (Widyarto & Yulinis, 2023). Dalam konteks ini, budaya Melayu tidak dapat dipahami sekadar sebagai manifestasi simbolik berupa bahasa, adat istiadat, atau seni tradisional, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus hidup dan bertransformasi dalam menjawab dinamika zaman.

Salah satu manifestasi budaya yang paling menonjol dan memiliki kekuatan simbolik tinggi adalah Tari Zapin Melayu (Widyarto & Yulinis, 2023). Tarian ini bukan sekadar bentuk ekspresi seni atau hiburan semata, melainkan juga memuat fungsi-fungsi edukatif dan spiritual—sebagai media dakwah, pendidikan moral, hingga penguat kohesi sosial dalam komunitas. Zapin, dengan ritme dan gerakannya yang khas, menjadi saluran kultural yang mampu merangkum nilai-nilai keislaman dan kemelayuan sekaligus. Namun demikian, kemuliaan nilai ini tidak terlepas dari persoalan besar yang dihadapi di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan penetrasi budaya populer. Eksistensi Zapin, sebagaimana bentuk seni tradisional lainnya, kian terpinggirkan oleh derasnya budaya baru yang lebih digemari generasi muda. Seni tradisional dianggap usang, kuno, bahkan tidak relevan dengan dinamika zaman yang serba instan dan digital. (Widyarto & Yulinis, 2023)

Fenomena ini memperlihatkan gejala krisis kultural yang lebih dalam, yakni adanya keterputusan narasi antara generasi pewaris budaya dan nilai-nilai lokal yang diwariskan. (Nahak, 2019) Di sinilah muncul problem epistemik sekaligus kultural: jika budaya Melayu dianggap sakral dan identik dengan Islam, mengapa ekspresi-ekspresi budayanya justru kehilangan ruang dalam kehidupan publik, terutama di kalangan anak muda? Di satu sisi, ada pandangan esensialis yang memandang budaya Melayu sebagai sesuatu yang sudah final dan tidak bisa dinegosiasi—

diikat kuat oleh religiusitas Islam sebagai elemen yang melekat. Namun di sisi lain, pendekatan konstruktivis melihat bahwa budaya Melayu, termasuk Zapin, adalah medan artikulasi nilai yang selalu bisa diperbarui dan diperkaya seiring zaman (Rohani et al., 2018).

Dengan demikian, mempertahankan eksistensi Tari Zapin dan budaya Melayu secara umum tidak cukup hanya melalui pelestarian seremonial, tetapi juga menuntut adanya reinterpretasi dan revitalisasi makna agar tetap kontekstual dan dialogis (Hendra, 2023a). Tantangannya bukan hanya pada aspek teknis (siapa yang mau menari), tetapi juga pada aspek ideologis: bagaimana budaya ini bisa tetap hidup tanpa menjadi museum identitas, dan bagaimana ia bisa merangkul generasi muda tanpa kehilangan akar nilai yang otentik. Studi tentang budaya Melayu—termasuk ekspresi seninya seperti Zapin—harus bergerak ke arah refleksi kritis terhadap relasi kuasa, wacana identitas, dan tarik-menarik antara pelestarian dan transformasi.

Urgensi pelestarian budaya ini semakin meningkat seiring dengan melemahnya transmisi budaya antar generasi. Jika tidak dikelola dengan baik, tradisi seperti Zapin bukan hanya akan terpinggirkan, tetapi juga bisa hilang dari kesadaran kolektif masyarakat Melayu Riau (Flouryilia, 2020). Oleh karena itu, pendekatan yang sistematis dan strategis melalui manajemen budaya menjadi sangat penting agar pelestarian tidak sekadar menjadi seremonial atau simbolik, tetapi benar-benar berdampak secara sosial dan kultural.

Sayangnya, dalam berbagai studi tentang budaya Melayu, pendekatan yang digunakan masih dominan bersifat deskriptif-antropologis. Kesenjangan kajian terlihat pada minimnya eksplorasi terhadap bagaimana praktik-praktik budaya seperti Zapin dikelola, dikembangkan, dan disesuaikan dengan dinamika sosial kontemporer. Tidak banyak kajian yang membedah praktik manajerial dari para pelaku budaya, komunitas seni, hingga institusi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan tradisi ini.

Artikel ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menawarkan perspektif manajemen budaya sebagai kerangka analisis utama. Kebaruan dari tulisan ini terletak pada cara pandangnya yang tidak hanya melihat Zapin sebagai ekspresi budaya semata, tetapi juga sebagai objek yang dapat dan harus dikelola secara strategis—mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan sumber daya, hingga evaluasi dampak budaya terhadap masyarakat. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam merumuskan model manajemen budaya berbasis kearifan lokal yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Kerangka Teori

Dalam mengkaji praktik pelestarian Zapin Melayu di Riau, artikel ini menggunakan pendekatan manajemen budaya sebagai kerangka teoretis utama. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa budaya bukan hanya entitas warisan masa lalu yang bersifat pasif dan statis, tetapi merupakan modal simbolik yang harus dikelola secara aktif dalam kerangka keberlanjutan sosial dan politik. (Retno, 2019) Manajemen budaya, dalam konteks ini, tidak sekadar merujuk pada proses administratif dalam mengelola aset budaya sebagai produk hiburan atau komoditas pariwisata. Lebih dari itu, ia merupakan proses sistematis yang melibatkan upaya pelestarian, revitalisasi, dan transformasi nilai, simbol, dan ekspresi tradisional agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer (Milatun Nuril A'yuni & Nur Laila Syarifah, 2022).

Secara konseptual, manajemen budaya menuntut adanya keterpaduan antara aktor, institusi, dan strategi kebudayaan. Sebagaimana dijelaskan oleh para pemikir seperti Tony Bennett dan Colin Mercer dalam kerangka *cultural policy studies*, budaya harus dilihat sebagai ruang produksi dan reproduksi makna yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, struktur ekonomi, serta preferensi sosial masyarakat. (Taylor, 2015) Dalam hal ini, Tari Zapin Melayu bukan hanya sebagai artefak seni tradisi, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat makna—menjadi tempat bersemayamnya nilai religius, etika komunitarian, dan narasi identitas (Lysgård, 2019).

Pendekatan manajemen budaya juga mengandaikan adanya pemetaan yang cermat terhadap *cultural ecology*, yaitu ekosistem budaya yang melibatkan pelaku seni, lembaga pendidikan, komunitas lokal, pemerintah, dan bahkan teknologi digital (FRAKE, 1962; “Introduction to Cultural Ecology,” 2005). Pengelolaan budaya dalam ekosistem ini harus berbasis partisipatif dan dialogis, di mana setiap aktor memainkan peran dalam menciptakan keberlanjutan Budaya (FitzGibbon & Tsioulakis, 2022). Oleh karena itu, pelestarian Zapin tidak cukup hanya dengan mempertahankan bentuk formalnya, tetapi juga perlu menyentuh dimensi fungsional dan maknawi yang melekat di dalamnya.

Dengan demikian, kerangka manajemen budaya memberikan landasan teoretis yang kokoh untuk memahami pelestarian Zapin Melayu bukan sekadar sebagai upaya konservatif untuk menjaga masa lalu, melainkan sebagai strategi dinamis untuk memastikan bahwa warisan budaya ini dapat terus hidup, berkembang, dan membentuk imajinasi kolektif generasi masa kini dan masa depan. Artinya, manajemen budaya menjadi jembatan antara pelestarian dan inovasi, antara akar tradisi dan tantangan zaman (Lysgård, 2019).

Secara umum, teori manajemen budaya merujuk pada penerapan prinsip-prinsip dasar manajemen—yakni *perencanaan* (planning), *pengorganisasian* (organizing), *penggerakan atau pelaksanaan* (actuating), dan *pengawasan atau evaluasi* (controlling)—ke dalam ranah kebudayaan. (Nahulue & Aslami, 2023) Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa pelestarian budaya tidak dapat diserahkan hanya pada naluri spontan atau loyalitas emosional semata, melainkan membutuhkan tata kelola yang sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam perspektif ini, budaya diperlakukan bukan sebagai artefak statis, melainkan sebagai sistem hidup yang harus dikelola dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberdayaan sosial (Suryandari, 2020).

Teori ini menekankan pentingnya pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam siklus manajemen kebudayaan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan budaya, komunitas seniman sebagai produsen nilai dan penjaga warisan, lembaga pendidikan sebagai mediator pengetahuan dan pembentuk kesadaran generasi muda, serta masyarakat umum sebagai subjek sekaligus objek dari praktik budaya itu sendiri. Koordinasi lintas-sektor ini menjadi syarat utama keberhasilan pelestarian, karena keberlanjutan budaya tidak mungkin tercapai hanya melalui intervensi sepihak (Sokolickova et al., 2012).

Dengan memasukkan prinsip manajerial ke dalam ranah budaya, pendekatan ini menggeser logika pelestarian dari sekadar "pengawetan" ke arah *pengelolaan yang berorientasi pada nilai dan fungsi*. Misalnya, perencanaan dalam konteks Zapin Melayu mencakup pemetaan potensi, kebutuhan, dan tantangan dalam pelestarian tarian tersebut. Pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur atau lembaga budaya yang mampu menjangkau akar rumput.

Tahap penggerakan menuntut aktivasi komunitas, pelatihan, dan regenerasi seniman muda. Sementara evaluasi dilakukan melalui monitoring dampak sosial, partisipasi masyarakat, serta keberhasilan adaptasi nilai Zapin di tengah perubahan zaman (Glaeser & Teherani-Krönner, 2020).

Oleh karena itu, teori manajemen budaya tidak hanya relevan sebagai alat teknokratis, tetapi juga sebagai pendekatan reflektif yang mengintegrasikan aspek nilai, strategi, dan partisipasi. Dalam konteks pelestarian Zapin Melayu di Riau, kerangka ini memberikan arah untuk mengelola budaya bukan hanya sebagai warisan, tetapi juga sebagai *living tradition* yang terus bergerak, berinteraksi, dan membentuk dinamika identitas masyarakat Melayu di tengah arus globalisasi (Beckstein, 2017).

Sebagai pelengkap dari kerangka manajemen budaya, artikel ini juga mengadopsi konsep pelestarian budaya berbasis komunitas (*community-based cultural preservation*). (Lozhkina, 2024) Pendekatan ini berangkat dari asumsi dasar bahwa keberlanjutan budaya tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemilik, pelaku, dan pewaris utama kebudayaan. Dalam perspektif ini, komunitas lokal tidak diposisikan sekadar sebagai objek yang harus "dilestarikan", melainkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, otoritas, dan kepekaan terhadap dinamika budayanya sendiri.

Secara teoretis, pendekatan ini bertumpu pada prinsip *bottom-up* dalam tata kelola budaya, di mana proses identifikasi, pemeliharaan, hingga pewarisan budaya dilakukan dengan menghargai kearifan lokal (*local wisdom*), pengalaman historis, serta struktur sosial-komunal yang telah terbentuk secara organik. Konsep ini juga menolak pelestarian budaya yang bersifat eksklusif atau elitis—yang hanya digerakkan oleh aktor eksternal seperti negara, lembaga akademik, atau pasar pariwisata—tanpa mempertimbangkan aspirasi dan partisipasi aktif komunitas setempat. Dalam konteks ini, budaya bukan hanya warisan, tetapi juga praktik hidup yang terus dinegosiasikan oleh masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu.

Pelestarian budaya berbasis komunitas juga memperkuat aspek *agency*, yaitu kemampuan masyarakat lokal untuk menentukan arah transformasi budaya mereka sendiri. Ini menjadi krusial, terutama ketika budaya seperti Zapin Melayu menghadapi tekanan dari modernisasi dan globalisasi. Pendekatan ini memungkinkan munculnya inovasi-inovasi lokal yang tetap berpijak pada nilai-nilai tradisional, sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman (Kayam, 1981). Misalnya, regenerasi penari Zapin melalui sanggar-sanggar lokal yang dikelola oleh tokoh adat atau seniman senior, atau pengembangan narasi-narasi baru yang memaknai kembali Zapin dalam konteks kontemporer—dari media dakwah hingga ekspresi identitas urban.

Dengan mengintegrasikan pendekatan manajemen budaya dan pelestarian berbasis komunitas, artikel ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan struktural dan kekuatan kultural di tingkat akar rumput. Kombinasi keduanya diyakini mampu menciptakan ekosistem pelestarian budaya yang lebih holistik, partisipatif, dan berkelanjutan. Maka, pelestarian Zapin Melayu bukan hanya soal mempertahankan bentuk, tetapi juga memastikan bahwa budaya ini tetap memiliki makna dan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau hari ini dan di masa depan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada praktik pelestarian Tari Zapin Melayu di Provinsi Riau. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipatif, serta wawancara mendalam dengan berbagai aktor budaya seperti: Tokoh masyarakat dan seniman Zapin, Pegiat sanggar seni budaya, Dinas Kebudayaan Riau, Dan masyarakat yang menjadi audiens aktif dalam pertunjukan Zapin (Moleong, 2017). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menangkap dinamika manajerial dalam pelestarian Zapin, baik dari segi strategi, tantangan, maupun peran aktor-aktor yang terlibat (Miles et al., 2014). Dengan metode ini, diharapkan artikel mampu memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana budaya Zapin tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dimanaj secara sadar untuk menjaga kesinambungan identitas budaya Melayu di tengah transformasi sosial yang terus berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Manajemen Budaya dalam Pelestarian Tari Zapin Melayu di Riau

Perencanaan (*Planning*): Menyusun Strategi

Dalam konteks pelestarian Tari Zapin Melayu di Riau, tahapan perencanaan merupakan aspek krusial yang merefleksikan arah, visi, dan strategi jangka panjang dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Berdasarkan temuan di lapangan, perencanaan umumnya dimotori oleh dua aktor utama, yaitu pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta komunitas seni lokal yang tergabung dalam berbagai sanggar budaya. Kedua aktor ini memainkan peran penting dalam merumuskan berbagai strategi pelestarian, seperti penyelenggaraan festival budaya tahunan, integrasi Zapin dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah, dan pelatihan rutin bagi generasi muda di lingkungan sanggar.

Jika ditinjau melalui perspektif teori manajemen budaya, aktivitas-aktivitas tersebut mencerminkan proses perencanaan yang terstruktur dan terukur, di mana pelestarian budaya tidak hanya dipahami sebagai kegiatan sporadis atau seremonial, tetapi sebagai agenda kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan. Dalam kerangka ini, festival budaya tidak sekadar menjadi ajang pertunjukan, melainkan bagian dari strategi promosi dan reproduksi budaya ke publik luas (Septiana, 2022). Integrasi Zapin dalam kurikulum lokal menunjukkan adanya kesadaran institusional untuk mentransformasikan nilai budaya ke dalam sistem pendidikan formal, sementara pelatihan di sanggar-sanggar merupakan bentuk regenerasi kultural berbasis praktik langsung (*experiential learning*).

Namun, dari sudut pandang pelestarian budaya berbasis komunitas, perlu ditekankan bahwa efektivitas perencanaan sangat bergantung pada sejauh mana komunitas lokal dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Perencanaan yang hanya bersifat top-down atau elitis berpotensi melahirkan pelestarian yang artifisial—terputus dari akar sosial-budaya Masyarakat (Swesti, 2019). Dalam hal ini, sanggar seni berfungsi sebagai aktor penghubung antara negara dan komunitas. Mereka tidak hanya menjalankan agenda yang dirancang dari atas, tetapi juga memproduksi ruang-ruang kultural alternatif di mana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga dan menafsir ulang warisan budayanya.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Tony Bennett mengenai budaya sebagai bentuk "*governance of conduct*," di mana budaya tidak hanya diatur, tetapi juga dipraktikkan dan dinegosiasikan secara sosial. Oleh karena itu, perencanaan dalam pelestarian Zapin idealnya bersifat kolaboratif dan partisipatif, mempertemukan kepentingan struktural (pemerintah) dengan kebutuhan kultural (komunitas). Dengan kata lain, keberhasilan pelestarian tidak hanya diukur dari seberapa banyak acara yang digelar, tetapi sejauh mana proses perencanaannya mampu menumbuhkan rasa memiliki, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat keberdayaan budaya masyarakat Melayu Riau secara kolektif.

Namun demikian, perencanaan pelestarian Tari Zapin yang telah dirancang oleh pemerintah dan komunitas seni tersebut belum sepenuhnya berangkat dari basis kebutuhan kultural masyarakat secara aktual. Dalam banyak kasus, perencanaan masih berwatak top-down, lebih mengikuti ritme dan logika birokrasi ketimbang menggali aspirasi serta partisipasi autentik dari komunitas lokal. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap model manajemen budaya konvensional yang cenderung menempatkan kebudayaan sebagai *objek administrasi*, bukan sebagai *proses sosial yang hidup dan berubah*.

Dalam kerangka pelestarian budaya berbasis komunitas, pendekatan semacam ini justru bertentangan dengan prinsip utama partisipasi aktif masyarakat dalam proses identifikasi, perencanaan, dan pewarisan budaya. Ketika program-program pelestarian didesain tanpa keterlibatan substantif dari pelaku budaya—seperti penari, pengajar sanggar, atau bahkan anak-anak muda yang menjadi target regenerasi—maka kebijakan tersebut cenderung menghasilkan “pertunjukan budaya” yang dangkal dan tidak kontekstual. Fenomena ini juga menggambarkan apa yang oleh James Clifford disebut sebagai *museifikasi budaya*, yakni menjadikan budaya sebagai artefak yang dibekukan dan dipamerkan, alih-alih dipraktikkan secara hidup dan relevan.

Dampaknya, sejumlah kegiatan pelestarian—seperti festival yang monoton, kurikulum muatan lokal yang kurang inovatif, atau pelatihan yang tidak adaptif—kerap kurang diminati, khususnya oleh generasi muda yang hidup dalam ekosistem budaya digital. Mereka tidak hanya mengonsumsi budaya dalam bentuk fisik, tetapi melalui media baru, seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Ketika perencanaan pelestarian budaya tidak mampu membaca pola konsumsi budaya digital ini, maka wajar jika minat generasi muda terhadap seni tradisional seperti Zapin mengalami penurunan. Padahal, menurut teori *cultural relevance* dalam pendidikan dan pelestarian budaya, keberhasilan regenerasi sangat bergantung pada kemampuan strategi pelestarian untuk menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan realitas sosial dan media yang relevan dengan generasi penerus.

Situasi ini menuntut adanya transformasi paradigma dari pendekatan yang bersifat struktural-birokratis ke arah yang lebih partisipatif, reflektif, dan kontekstual. Keterlibatan masyarakat, khususnya anak muda, tidak hanya penting dalam pelaksanaan program, tetapi juga dalam tahap perencanaan—mulai dari pemetaan masalah hingga perumusan metode pelestarian yang inovatif dan relevan secara kultural. Oleh karena itu, mengintegrasikan pendekatan *community-based* dan *youth-centered cultural planning* menjadi suatu keniscayaan bagi keberlangsungan seni tradisional seperti Zapin Melayu dalam lanskap budaya yang terus berubah.

Pengorganisasian (*Organizing*): Membangun Kolaborasi

Pada aspek pengorganisasian, pelestarian Tari Zapin di Riau menunjukkan dinamika yang

kompleks dan melibatkan berbagai aktor kultural yang tersebar dalam jejaring komunitas. Beberapa entitas utama dalam jejaring ini antara lain Sanggar Zapin Al-Falah, Sanggar Tuah Sekato, dan Rumah Zapin yang tersebar di Kota Pekanbaru serta wilayah-wilayah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, dan Indragiri. Ketiga lembaga ini berperan sebagai simpul budaya (*cultural hubs*) yang tidak hanya menyelenggarakan pelatihan dan pertunjukan Zapin, tetapi juga membangun relasi lintas generasi serta lintas kelembagaan, seperti dengan sekolah-sekolah, tokoh adat, dan pemerintah daerah.

Dalam kerangka teori manajemen budaya, fungsi *organizing* tidak semata-mata merujuk pada pembentukan struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup pembentukan relasi fungsional dan sinergis antaraktor dalam sistem budaya. Artinya, keberhasilan pengorganisasian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi formal, tetapi juga oleh kohesi dan kapasitas jejaring sosial untuk bekerja sama dalam tujuan pelestarian. Di sinilah pentingnya konsep ekosistem budaya—yakni sebuah lanskap sosial tempat berbagai aktor budaya saling berinteraksi, berbagi sumber daya, dan berkolaborasi dalam menjaga keberlangsungan ekspresi budaya lokal.

Lebih jauh, keterhubungan antar-sanggar dan komunitas lokal ini juga mencerminkan keberadaan modal sosial (*social capital*) yang kuat, terutama dalam bentuk kepercayaan (*trust*), norma bersama, dan jaringan (*networks*), sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu dan Robert Putnam. Kolaborasi dengan sekolah, misalnya, menunjukkan bentuk aliansi strategis yang memperkuat integrasi antara ruang edukatif dan ruang kultural, sementara kehadiran tokoh adat dalam kegiatan sanggar merepresentasikan upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal secara intergenerasional.

Namun demikian, meskipun struktur pengorganisasian tampak solid, tantangan tetap muncul, terutama dalam hal distribusi peran dan sumber daya yang tidak selalu merata. Beberapa sanggar budaya, khususnya di daerah pesisir yang jauh dari pusat kota, sering menghadapi keterbatasan dukungan logistik, pendanaan, dan akses terhadap pelatihan profesional. Di sisi lain, sanggar-sanggar di kota besar cenderung lebih mudah menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi atau institusi pemerintah, sehingga menciptakan ketimpangan ekosistem budaya yang potensial menghambat regenerasi yang merata.

Oleh karena itu, pengorganisasian dalam pelestarian Tari Zapin seharusnya tidak berhenti pada penciptaan struktur kelembagaan, tetapi juga menekankan pada penguatan jejaring kerja horizontal berbasis nilai-nilai kolaboratif, keterbukaan, dan keadilan kultural. Pendekatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan pertunjukan Zapin, tetapi juga membuka ruang bagi praktik budaya yang lebih demokratis dan berorientasi pada kebutuhan komunitas.

Meski secara struktural pengorganisasian pelestarian Zapin telah menunjukkan keterhubungan yang menjanjikan, namun kenyataannya masih menghadapi sejumlah persoalan klasik yang menghambat efektivitas dan keberlanjutan praktik budaya ini. Salah satu tantangan utama adalah minimnya regenerasi manajer budaya muda. Proses kaderisasi dalam struktur pengelolaan sanggar dan komunitas seni cenderung bergantung pada figur-figur senior yang memiliki otoritas kultural historis, tetapi sering kali tidak memiliki strategi atau kapasitas untuk mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan manajerial kepada generasi baru. Fenomena ini menunjukkan adanya ketergantungan pada otoritas tradisional, yang menurut teori *cultural leadership*, dapat menciptakan *stagnasi inovasi* dan mempersempit ruang partisipasi generasi muda

sebagai pelaku utama dalam ekosistem budaya masa depan.

Lebih jauh, kelemahan pengorganisasian ini juga diperparah oleh keterbatasan sumber daya, terutama dalam aspek pendanaan operasional, pelatihan, dan infrastruktur seni. Ketergantungan pada anggaran pemerintah yang fluktuatif membuat banyak sanggar harus bergantung pada semangat voluntarisme dan solidaritas internal, yang dalam jangka panjang rentan terhadap kelelahan struktural (*structural burnout*). Dalam perspektif manajemen budaya, kondisi ini mencerminkan lemahnya aspek *sustainability planning*, yakni kemampuan sistem budaya untuk mempertahankan eksistensinya secara mandiri dan berkesinambungan melalui inovasi kelembagaan, diversifikasi sumber pendanaan, dan penguatan kelembagaan akar rumput.

Selain itu, kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia seni tradisi juga menjadi tantangan serius dalam proses pengorganisasian. Meskipun beberapa sekolah telah menjadikan Zapin sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler atau muatan lokal, namun pendekatan yang digunakan sering kali tidak kontekstual dan sekadar formalitas kurikuler. Hal ini mencerminkan apa yang disebut oleh para ahli pendidikan budaya sebagai *institutional gap*, yaitu ketidaksinambungan antara nilai budaya lokal dengan pendekatan pedagogis formal yang terlalu normatif dan terputus dari praktik budaya hidup. Padahal, dalam kerangka pendidikan berbasis budaya lokal, seni tradisional seperti Zapin dapat menjadi medium efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter, identitas lokal, dan keberagaman melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual.

Situasi ini menuntut perlunya reposisi strategi pengorganisasian pelestarian Zapin dengan memberikan perhatian serius pada tiga aspek utama: (1) *regenerasi kepemimpinan budaya muda* melalui program mentoring dan inkubasi budaya, (2) *penguatan kapasitas kelembagaan* sanggar agar tidak hanya bergantung pada dana publik, serta (3) *reintegrasi pendidikan formal* ke dalam ekosistem budaya lokal secara aktif dan bermakna. Tanpa langkah-langkah tersebut, pengorganisasian pelestarian Zapin akan terus menghadapi *inertia sosial* yang membatasi ruang tumbuh dan hidupnya sebagai seni warisan yang relevan bagi generasi mendatang.

Penggerakan (*Actuating*): *Membangkitkan Partisipasi dan Daya Hidup Tradisi*

Aspek *actuating* atau penggerakan dalam pelestarian Tari Zapin di Riau memperlihatkan dinamika yang cukup progresif, terutama melalui inisiatif-inisiatif kreatif yang bersumber dari komunitas seni dan jejaring budaya lokal. Praktik penggerakan ini tidak hanya sebatas menggelar pertunjukan atau pelatihan konvensional, tetapi juga telah merambah ke wilayah digital dan kolaboratif yang lebih luas. Berbagai kegiatan seperti *workshop* tari bagi generasi muda, pertunjukan publik di ruang terbuka atau panggung formal, pelatihan guru seni di sekolah-sekolah, hingga kerja sama lintas komunitas—termasuk dengan seniman dari genre modern atau lintas budaya—menjadi strategi penting dalam mentransformasikan Zapin dari sekadar artefak budaya menjadi bentuk ekspresi yang terus hidup (Harma et al., 2017).

Dalam konteks teori *manajemen budaya*, proses *actuating* ini mencerminkan pentingnya *mobilisasi sumber daya kultural* (*cultural resource mobilization*) secara terarah, yang tidak hanya mengandalkan aktor pemerintah, tetapi juga menjadikan komunitas lokal sebagai agen penggerak utama. Bahkan, dalam beberapa kasus, komunitas kreatif telah menunjukkan *agensi budaya* yang tinggi dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai medium baru untuk mentransmisikan nilai dan estetika Zapin (Hendra, 2023b). Video-video pertunjukan yang

diunggah melalui YouTube, TikTok, atau Instagram Reels tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat *kultural rebranding*, yakni upaya untuk mengemas kembali citra Zapin agar lebih menarik, relatable, dan relevan bagi audiens digital, khususnya generasi muda urban.

Fenomena ini juga sejalan dengan pendekatan pelestarian budaya berbasis komunitas, di mana partisipasi masyarakat tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik atau lokal, tetapi juga di ruang-ruang digital (*digital cultural space*). Keberhasilan komunitas dalam mengadaptasi Zapin ke dalam format kontemporer ini merupakan contoh konkret dari *cultural hybridization*, yaitu proses di mana tradisi lokal tidak kehilangan identitas aslinya, namun mampu berdialog secara kreatif dengan unsur-unsur global dan modern. Hal ini penting untuk menjaga kontinuitas budaya dalam lanskap masyarakat yang semakin terdigitalisasi dan terdiferensiasi secara nilai serta selera (Evadila et al., 2019).

Namun demikian, proses pergerakan ini tetap memerlukan penguatan kapasitas, terutama dalam hal *literasi digital budaya*, strategi pemasaran konten, serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Tanpa itu, potensi besar media digital dalam pelestarian budaya tradisional bisa terhambat atau bahkan berbalik menjadi sekadar *folklorisasi dangkal*, yang hanya menampilkan Zapin sebagai tontonan eksotik tanpa pemaknaan kontekstual (Annisafitri, 2018). Oleh karena itu, sinergi antara pelaku seni, akademisi, komunitas digital, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap gerakan pelestarian berjalan bukan hanya sebagai respons terhadap tantangan zaman, tetapi juga sebagai proses transformasi budaya yang berkesadaran.

Langkah-langkah komunitas dalam memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan Tari Zapin menunjukkan adanya kesadaran kultural baru terhadap pentingnya adaptasi medium sebagai bagian dari strategi pelestarian. Hal ini mencerminkan bentuk *cultural responsiveness* terhadap pergeseran pola komunikasi dan konsumsi budaya masyarakat, terutama generasi digital native. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya diiringi oleh kapasitas literasi digital yang memadai maupun kemampuan produksi konten yang berkualitas (Utami et al., 2018). Banyak komunitas seni masih terbatas dalam hal perangkat teknologi, keahlian *storytelling digital*, hingga pemahaman tentang algoritma media sosial sebagai bagian dari *kultur distribusi*. Akibatnya, meskipun semangat pelestarian tinggi, konten yang dihasilkan kerap tidak menjangkau audiens lebih luas atau gagal mengemas nilai-nilai Zapin secara menarik dan edukatif.

Dalam perspektif *manajemen budaya*, kondisi ini menggambarkan adanya *kesenjangan antara perencanaan dan pergerakan*—di mana ide untuk berekspansi ke ruang digital sudah ada, tetapi sistem pendukungnya belum dibangun secara strategis dan berkelanjutan. Padahal, salah satu pilar utama *actuating* adalah menggerakkan sumber daya secara efektif dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan sosial dari para pelakunya (Nora et al., 2022). Ketimpangan ini juga memperlihatkan tantangan besar dalam implementasi pendekatan *pelestarian berbasis komunitas* yang sejatinya mengedepankan *empowerment* masyarakat sebagai agen utama pelestarian, bukan hanya sebagai objek program budaya yang bersifat seremonial.

Namun demikian, antusiasme masyarakat untuk tetap menjadikan Zapin sebagai bagian dari kehidupan sosial dan spiritual—terutama di wilayah pesisir seperti Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir—adalah modal kultural yang sangat penting. Di daerah-

daerah ini, Zapin tidak hanya tampil sebagai seni pertunjukan, tetapi juga sebagai medium dakwah, simbol solidaritas kolektif, dan bahkan ekspresi spiritual dalam berbagai ritual adat dan keagamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa *akar budaya* Zapin masih kuat tertanam dalam struktur sosial masyarakat Melayu Riau, meskipun terpaan globalisasi dan perubahan selera generasi muda terus berlangsung (Suryani & Fitriah, 2019).

Hal ini sejalan dengan gagasan *living culture*, yakni budaya yang terus mengalami negosiasi dan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Keberlanjutan budaya, dalam hal ini, tidak hanya bergantung pada kemampuan adaptasi media, tetapi juga pada *resiliensi sosial budaya* yang tumbuh dari partisipasi aktif dan afeksi masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Oleh karena itu, upaya pelestarian yang efektif harus mampu menjembatani antara *resistensi terhadap disrupsi budaya* dan *transformasi kreatif*, dengan tetap mengakar pada nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas.

Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling*): Menakar Dampak dan Menjaga Keberlanjutan

Aspek *pengawasan* (*controlling*) dalam pelestarian budaya, khususnya Tari Zapin Melayu di Riau, masih menunjukkan kelemahan struktural dan metodologis yang cukup signifikan. Evaluasi terhadap program-program pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait umumnya bersifat administratif dan prosedural—terbatas pada pelaporan kegiatan, capaian kuantitatif, dan serapan anggaran. Pendekatan evaluatif semacam ini, meskipun penting untuk akuntabilitas birokrasi, tidak cukup untuk mengukur efektivitas dan dampak substansial dari program terhadap dimensi kultural yang lebih mendalam.

Dalam perspektif *manajemen budaya*, fungsi *controlling* seharusnya tidak hanya menjadi instrumen pengawasan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme reflektif yang menilai keberlanjutan nilai-nilai budaya, efektivitas regenerasi pelaku budaya, dan penguatan identitas kultural masyarakat. Namun sayangnya, tidak banyak upaya yang secara sistematis menilai sejauh mana kegiatan pelestarian mampu meningkatkan kesadaran budaya generasi muda, menciptakan kaderisasi seniman baru, atau memperkuat relasi emosional antara komunitas dan ekspresi budayanya. Akibatnya, pelestarian cenderung berhenti pada ranah simbolik dan seremonial, bukan pada perubahan struktural dalam sistem transmisi budaya.

Minimnya pengawasan yang partisipatif juga menunjukkan kurangnya internalisasi pendekatan *pelestarian berbasis komunitas* dalam praktik pengelolaan budaya. Dalam pendekatan ini, proses evaluasi idealnya melibatkan masyarakat sebagai subjek reflektif—yang tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga penilai terhadap kebermaknaan budaya yang mereka warisi. Dengan kata lain, *impact assessment* tidak hanya bersandar pada ukuran-ukuran teknokratis, tetapi juga pada parameter sosial-kultural seperti peningkatan partisipasi lokal, revitalisasi praktik-praktik tradisional, serta munculnya inovasi yang tetap berakar pada nilai budaya (Angriani et al., 2022).

Ketiadaan indikator kualitatif dalam pengawasan membuat banyak program pelestarian kehilangan orientasi jangka panjang. Padahal, dalam era disrupsi budaya dan derasnya arus globalisasi, penguatan sistem evaluasi yang adaptif dan kontekstual sangat penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi budaya benar-benar menumbuhkan *cultural resilience*. Evaluasi harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis: Apakah Zapin hanya ditampilkan dalam festival tahunan, ataukah sudah menjadi bagian dari identitas sehari-hari anak muda? Apakah pelatihan seni berhasil menciptakan pelaku budaya baru, atau hanya

menggukur kewajiban program tahunan?

Tanpa pengawasan yang berbasis pada nilai dan partisipasi komunitas, pelestarian budaya akan terus berada dalam jebakan formalisme administratif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi pendekatan evaluatif yang tidak hanya menilai apa yang telah dilakukan, tetapi juga menimbang apa yang belum dicapai dan bagaimana budaya itu hidup di tengah Masyarakat (Hadi & Yuwanti, 2022).

Meski pengawasan formal terhadap pelestarian Tari Zapin masih minim, sebagian komunitas budaya di Riau telah mulai menginisiasi sistem evaluasi yang lebih partisipatif dan kontekstual. Beberapa sanggar, misalnya, mulai menggunakan *feedback* dari penonton sebagai tolok ukur keberhasilan pertunjukan, mengarsipkan dokumentasi visual sebagai rekam jejak budaya, serta mencatat jumlah dan demografi partisipan dalam setiap kegiatan. Praktik-praktik ini merupakan embrio dari model *community-based cultural monitoring*, yaitu sistem evaluasi yang tumbuh dari bawah dan berakar pada kebutuhan serta pengalaman langsung komunitas budaya.

Namun, inisiatif-inisiatif tersebut masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan dalam sistem pengelolaan budaya secara menyeluruh. Dalam kerangka teori *manajemen budaya*, kegiatan evaluasi seharusnya terintegrasi dalam siklus perencanaan strategis, di mana data hasil pengawasan menjadi landasan untuk pengambilan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap dinamika komunitas. Sayangnya, ketidakhadiran kebijakan kultural yang konsisten dan terukur membuat evaluasi berbasis komunitas ini sulit diintegrasikan ke dalam mekanisme institusional yang lebih luas.

Padahal, keberadaan sistem pengawasan yang inklusif dan adaptif merupakan elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan budaya, terutama dalam konteks tantangan kontemporer seperti globalisasi, komersialisasi budaya, dan perubahan pola konsumsi seni di era digital. Tanpa dukungan kebijakan yang menjamin keberlanjutan praktik evaluatif berbasis komunitas, maka inisiatif lokal akan terus berisiko terputus oleh perubahan politik, minimnya anggaran, atau bergantung pada individu-inisiatif belaka.

Oleh karena itu, *pelestarian berbasis komunitas* yang diadopsi dalam artikel ini perlu dilihat sebagai bukan hanya strategi pelibatan masyarakat dalam praktik budaya, tetapi juga sebagai pendekatan epistemologis baru dalam manajemen budaya: masyarakat bukan hanya pewaris budaya, tetapi juga penilai, perancang, dan penjaga arah kebudayaan mereka sendiri. Dalam konteks ini, kebijakan kultural yang transformatif seharusnya memberi ruang bagi komunitas untuk berperan sebagai aktor utama dalam sistem evaluasi, bukan sekadar objek dari kebijakan negara.

Tari Zapin bukan sekadar seni pertunjukan yang menyenangkan secara estetis, tetapi juga merupakan representasi simbolik dari nilai-nilai luhur masyarakat Melayu. Dalam setiap gerakan yang ritmis dan harmonis, tersirat ajaran kesopanan, spiritualitas, serta kehalusan rasa yang menjadi fondasi budaya Melayu itu sendiri. Nilai-nilai ini tidak hanya hadir dalam bentuk tarian, melainkan juga dalam struktur sosial yang menopang praktik budaya tersebut—seperti relasi antara guru dan murid di sanggar, etika pertunjukan, hingga pilihan musik dan syair yang sarat pesan moral.

Oleh karena itu, *manajemen budaya* atas Tari Zapin tidak dapat dipahami hanya sebagai

upaya mempertahankan bentuk artistiknya. Lebih dari itu, manajemen budaya harus dilihat sebagai proses strategis dalam menjaga esensi nilai-nilai kultural, sambil secara dinamis menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam bahasa manajerial, pelestarian Zapin menuntut adanya keseimbangan antara *konservasi nilai* (*value preservation*) dan *adaptasi inovatif* (*innovative adaptation*). Ini sejalan dengan prinsip utama dalam teori manajemen budaya yang mengharuskan adanya kesinambungan antara *tradisi* dan *transformasi*.

Dalam konteks ini, pendekatan *pelestarian berbasis komunitas* menjadi sangat penting. Komunitas lokal bukan hanya berperan sebagai pelaku pelestari, tetapi juga sebagai penjaga otentisitas makna budaya yang terkandung dalam Zapin. Mereka memiliki *cultural memory* yang tidak bisa digantikan oleh pendekatan teknokratis semata. Oleh karena itu, setiap langkah inovasi terhadap Zapin—entah melalui format digital, penggabungan genre musik, atau eksplorasi koreografi—harus tetap memperhatikan aspek nilai dan makna budaya yang melekat di dalamnya. Adaptasi tanpa arah nilai justru berisiko menggerus keotentikan Zapin sebagai ekspresi jati diri Melayu (Fernando & Mansyur, 2022).

Artinya, pengelolaan Zapin harus dijalankan dengan prinsip *keseimbangan nilai dan konteks*. Di satu sisi, kita tidak boleh membiarkan Zapin membeku dalam nostalgia masa lalu yang tidak relevan dengan generasi hari ini. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terjebak dalam logika komodifikasi yang mengabaikan akar spiritual dan etis dari kesenian ini. Inilah tantangan sekaligus peluang dari manajemen budaya yang visioner: bagaimana menjadikan Zapin sebagai ruang dialektika antara masa lalu dan masa depan, antara nilai-nilai lokal dan tuntutan global.

Dengan demikian, manajemen budaya atas Tari Zapin harus diletakkan dalam kerangka pemikiran strategis yang tidak hanya memelihara bentuk, tetapi juga merawat makna, menghidupkan semangat komunitas, dan membuka jalan bagi inovasi yang tetap berakar pada identitas Melayu. Jika tidak dikelola secara adaptif dan partisipatif, Tari Zapin berpotensi mengalami *museumisasi budaya*—yakni mengalami pergeseran dari praktik hidup yang dinamis menjadi artefak mati yang hanya dipentaskan dalam acara-acara seremonial atau agenda birokratis belaka. Dalam kondisi seperti ini, Zapin kehilangan fungsi sosial dan kulturalnya sebagai media ekspresi kolektif, spiritualitas, dan identitas komunitas Melayu. Ia berubah menjadi tontonan yang terlepas dari konteks keseharian masyarakat, sebuah "simulakra" budaya yang lebih dekat dengan estetika konsumsi daripada makna yang hidup.

Karena itu, pendekatan manajemen budaya atas Zapin perlu mengalami transformasi paradigma: dari manajemen berbasis proyek (*project-based management*) menuju manajemen berbasis *living tradition*. Pendekatan ini tidak sekadar berorientasi pada output program seperti pertunjukan dan festival tahunan, melainkan lebih menekankan pada proses internalisasi budaya secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kerangka *living tradition*, budaya tidak dilestarikan karena masa lalunya, tetapi karena fungsinya yang terus hidup dan dibutuhkan dalam kehidupan masa kini dan masa depan.

Transformasi ini juga sejalan dengan prinsip pelestarian berbasis komunitas yang menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat sebagai pemilik sah dari tradisi tersebut. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek penerima program, melainkan sebagai subjek yang menentukan arah, bentuk, dan cara pelestarian yang paling sesuai dengan konteks lokal. Pemerintah dan institusi budaya dalam hal ini harus berperan sebagai fasilitator dan katalisator,

bukan sekadar operator proyek kultural (Jailani et al., 2023).

Selain itu, pendekatan *living tradition* juga menuntut adanya inovasi yang tetap berpijak pada nilai-nilai dasar kebudayaan. Misalnya, penggunaan teknologi digital untuk dokumentasi, edukasi, dan distribusi pertunjukan Zapin harus dibarengi dengan penguatan literasi budaya dan nilai-nilai yang dikandung dalam seni tersebut. Dengan begitu, generasi muda dapat merasakan relevansi Zapin dengan kehidupan mereka, sekaligus tetap menghormati akar kulturalnya.

Dengan demikian, keberlanjutan Zapin sebagai ekspresi budaya tidak hanya bergantung pada seberapa sering ia dipentaskan, tetapi pada seberapa dalam ia dihidupi oleh masyarakat. Inilah esensi dari manajemen budaya yang berorientasi pada *living tradition*: menjaga agar Zapin tetap menjadi denyut identitas Melayu yang hidup, bergerak, dan bermakna di tengah perubahan zaman.

PENUTUP

Pelestarian Tari Zapin Melayu di Riau tidak dapat dilepaskan dari konteks identitas kultural masyarakat Melayu yang terus mengalami tekanan akibat modernisasi dan globalisasi. Melalui pendekatan manajemen budaya, kita dapat melihat bahwa upaya pelestarian ini memerlukan perencanaan yang matang, pengorganisasian aktor-aktor budaya yang sinergis, penggerakan yang partisipatif dan adaptif terhadap zaman, serta pengawasan yang evaluatif dan berorientasi pada dampak sosial. Namun demikian, praktik manajemen budaya Zapin di Riau masih menghadapi tantangan serius, seperti kurangnya pelibatan generasi muda, minimnya penggunaan teknologi digital secara optimal, serta lemahnya sistem evaluasi keberhasilan program. Oleh karena itu, transformasi pendekatan dari seremonial ke substantif, dari proyek sesaat ke strategi jangka panjang, menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi ini sebagai identitas hidup masyarakat Melayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2023). Islam dan Budaya Politik Melayu. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 17(2). <https://doi.org/10.19109/medinate.v17i2.17008>
- Angriani, A. D., Efi, A., & Dewi, Y. (2022). PERUBAHAN FUNGSI DAN BENTUK PERTUNJUKAN TARI ZAPIN DI PURNAMA KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA MADYA DUMAI PROVINSI RIAU. *Gorga: Jurnal Seni Rupa*, 11(2). <https://doi.org/10.24114/gr.v11i2.39682>
- Annisafitri, A. (2018). Tari Zapin Tradisi Disanggar Sekayuh Sehati Kabupaten Siak. *Repository UPI*.
- Beckstein, M. (2017). The concept of a living tradition. *European Journal of Social Theory*, 20(4). <https://doi.org/10.1177/1368431016668185>
- Budiman, A. (2018). MENGHULU BERBUDAYA MELAYU, MENGHILIR RIAU BERINTEGRITAS: NILAI ANTI KORUPSI PADA MATA DIKLAT ANTI KORUPSI BPSDM PROVINSI RIAU. *Jurnal Pendidikan Guru*, 1(1).
- Evadila, E., Erawati, Y., Ningtias, Y. A., & Soedarsono. (2019). Perkembangan Tari Tradisi Zapin Bengkalis Ke Zapin Meranti Di Sanggar Zapin Tradisi Hangtuh Desa Perumbi Kecamatan Tebing *Koba*, 6(1).
- Fernando, Y., & Mansyur, H. (2022). Koreografi Tari Zapin Bertasbih Pada Sanggar Tasik Malay Art Di Pekanbaru. *Jurnal Sendratasik*, 11(1). <https://doi.org/10.24036/js.v11i1.114207>
- FitzGibbon, A., & Tsioulakis, I. (2022). Making it up: Adaptive approaches to bringing freelance cultural work to a cultural ecologies discourse. *European Urban and Regional Studies*, 29(4). <https://doi.org/10.1177/09697764221095758>
- Flouryia, I. (2020). Tarian Zapin Sebagai Peninggalan Budaya Arab Di Tanah Melayu. *Sekolah*

- Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta*, 1(2).
- FRAKE, C. O. (1962). Cultural Ecology and Ethnography. *American Anthropologist*, 64(1). <https://doi.org/10.1525/aa.1962.64.1.02a00060>
- Glaeser, B., & Teherani-Krönner, P. (2020). Human ecology, cultural ecology, ethnoecology. *Natur Und Landschaft*, 95(9–10). <https://doi.org/10.17433/9.2020.50153837.407-417>
- Hadi, F., & Yuwanti, S. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN TARIAN TRADISIONAL ZAPIN BENGKALIS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MINAT KHUSUS DAYA TARIK WISATA DAN BUDAYA. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/jempper.v1i3.537>
- Hasanuddin, H. (2017). ETNOMATEMATIKA MELAYU: PERTAUTAN ANTARA MATEMATIKA DAN BUDAYA PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU. *Sosial Budaya*, 14(2). <https://doi.org/10.24014/sb.v14i2.4429>
- Hendra, D. F. (2023a). Kajian Dasar Bentuk Gerak Tari Dan Musik Iringan Tari Zapin Penyengat. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni*, 8(2).
- Hendra, D. F. (2023b). TARI ZAPIN SAYANG SERAWAK: BENTUK DAN PERKEMBANGAN. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.365>
- Hidayat. (2008). Akulturasi Islam dan Budaya Melayu: Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau. In *Disertasi*.
- Introduction to cultural ecology. (2005). *Choice Reviews Online*, 42(05). <https://doi.org/10.5860/choice.42-2898>
- Jailani, A., Dora, E., & Azizah, K. (2023). NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM TARIAN ZAPIN DAN UPAYA PELESTARIANNYA DI DESA MESKOM BENGKALIS RIAU. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 3(2). <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i2.72>
- Kayam, U. (1981). *Seni, Tradisi, Masyarakat*. Sinar Harapan.
- Lozhkina, E. (2024). The Source of Living Tradition. *Yearbook of Balkan and Baltic Studies*, 6. <https://doi.org/10.7592/ybbs6.15>
- Lysgård, H. K. (2019). The assemblage of culture-led policies in small towns and rural communities. *Geoforum*, 101. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.02.019>
- Milaton Nuril A'yuni, & Nur Laila Syarifah. (2022). Manajemen Pengorganisasian Dakwah Dalam Perayaan Budaya Sekaten Di Keraton Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Cross-case data analysis. In *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Hanif, & Dian Dwi OkPutra. (2021). The Role of Islamic Government in Bumi Melayu: Peran Pemerintahan Islam Di Bumi Melayu. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(2).
- Nahak, H. M. I. (2019). UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1). <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Nahulæ, L. L., & Aslami, N. (2023). Menerapkan Prinsip-prinsip Manajemen Perubahan Islam: Membentuk Budaya Organisasi yang Responsif dan Adaptif. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3).
- Nora, S., Nofrizal, N., & Evi, A. (2022). PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN TARI ZAPIN BENGKALIS DALAM BERBAGAI KRITERIA. *Gorga : Jurnal Seni Rupa*, 11(2). <https://doi.org/10.24114/gr.v11i2.34530>
- Retno, L. A. (2019). Sistem Manajemen Kesenian Jaran Kepang Turonggo Mudo Ngesti Budaya Kabupaten Semarang Sebagai Upaya Eksistensi Seni Tradisi. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 14(4). <https://doi.org/10.14710/nusa.14.4.487-497>
- Rohani, R., Novianty, F., & Firmansyah, S. (2018). ANALISIS UPAYA MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(2). <https://doi.org/10.31932/ve.v9i2.174>
- Harma, A. R., Desfiarni, & Susmiarti. (2017). Faktor Penghambat Perkembangan Tari Zapin Melayu Di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan*, 6(1).
- Septiana, F. (2022). Pelestarian Budaya Tradisi Indang di Korong Kuliek, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman-Sumatera Barat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.36722/jpm.v4i3.1207>
- Sokolickova, Z., Lapka, M., Vávra, J., Block, K., Dickel, S., Rödder, S., & Pellow, D. (2012).

- Cultural Ecology: Contemporary Understanding of the Relationship between Humans and the Environment. *Journal of Landscape Ecology*, 5(2).
- Suryandari, N. (2020). Teori Manajemen Identitas: Kajian tentang Faceworks dalam Hubungan antar Budaya. *Jurnal Komunikasi*, 14(1). <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i1.7171>
- Suryani, N., & Fitriah, L. (2019). SENI PERTUNJUKAN TARI ZAPIN API DI RUPAT UTARA BENGKALIS PROVINSI RIAU. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.22437/titian.v3i1.7030>
- Swesti, W. (2019). The Social-Cultural Impact of Tourism In Banda Aceh. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*, 13(2).
- Taylor, C. (2015). Between Culture, Policy and Industry: Modalities of Intermediation in the Creative Economy. *Regional Studies*, 49(3). <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.748981>
- Utami, P., Rahayu, T., & Muda, I. (2018). PENERAPAN METODE MUSICAL FEELING DALAM BELAJAR TARI ZAPIN MELAYU DI SANGGAR TARI TAMORA 88. *Gesture : Jurnal Seni Tari*, 7(1). <https://doi.org/10.24114/senitari.v7i1.11906>
- Widyarto, R., & Yulinis, Y. (2023). Estetika Budaya Melayu dalam Tari Zapin Riau. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni*, 8(1). <https://doi.org/10.30870/jpks.v8i1.19203>